



# BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



## LKJiP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2022



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kita kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini mengacu kepada Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dan juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680307 199009 1 001



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>5</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                          | 5         |
| 1.2 Tugas dan Fungsi .....                        | 6         |
| 1.3 Isu Strategis .....                           | 9         |
| 1.4 Landasan Hukum .....                          | 9         |
| 1.5 Sistematika Penyusunan .....                  | 9         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>           | <b>11</b> |
| 2.1 Rencana Strategis Bappeda Sebelum Review..... | 11        |
| 2.2 Rencana Strategis.....                        | 22        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>        | <b>32</b> |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....             | 15        |
| 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....         | 32        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                       | <b>69</b> |



## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1  | Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Sebelum Review.....                       | 15 |
| Tabel 2.2  | Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Setelah Review.....                       | 17 |
| Tabel 2.3  | Indikator Kinerja Utama Bappeda Sebelum Review .....  | 18 |
| Tabel 2.4  | Indikator Kinerja Utama Bappeda Setelah Review .....  | 20 |
| Tabel 2.5  | Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022 .....   | 20 |
| Tabel 2.6  | Tujuan dan Sasaran Bappeda Sebelum Review .....   | 24 |
| Tabel 2.7  | Tujuan dan Sasaran Bappeda Setelah Review .....   | 25 |
| Tabel 2.8  | Indikator Kinerja Utama .....   | 26 |
| Tabel 2.9  | Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022 .....   | 27 |
| Tabel 2.10 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2022 .....   | 27 |
| Tabel 3.1  | Prediket Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....  | 33 |
| Tabel 3.2  | Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022 ...  | 34 |
| Tabel 3.3  | Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022.....  | 35 |
| Tabel 3.4  | Pencapaian Target Misi .....  | 35 |
| Tabel 3.5  | Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....   | 36 |
| Tabel 3.6  | Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan .....   | 37 |
| Tabel 3.7  | Komponen penilaian .....  | 39 |
| Tabel 3.8  | Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 1   | 40 |
| Tabel 3.9  | Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1 .....   | 42 |
| Tabel 3.10 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya capaian kinerja pembangunan  | 43 |
| Tabel 3.11 | Capaian IKU Kota Payakumbuh .....   | 44 |
| Tabel 3.12 | Capaian Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 2.....                            | 46 |
| Tabel 3.13 | Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2 .....   | 48 |
| Tabel 3.14 | Analisis Pencapaian sasaran 3 .....   | 62 |
| Tabel 3.16 | Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 3   | 62 |
| Tabel 3.17 | Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3.....  | 64 |
| Tabel 3.18 | Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 .....               | 65 |
| Tabel 3.19 | Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022..... | 66 |
| Tabel 3.20 | Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2017-2022 .....       | 67 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda kota Payakumbuh Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda kota Payakumbuh Tahun 2022 diharapkan dapat Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda kota Payakumbuh, Mendorong Bappeda kota Payakumbuh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerjanya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda Kota payakumbuh sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh dalam kedudukannya sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat diamanatkan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Bappeda memiliki tugas pokok “Membantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

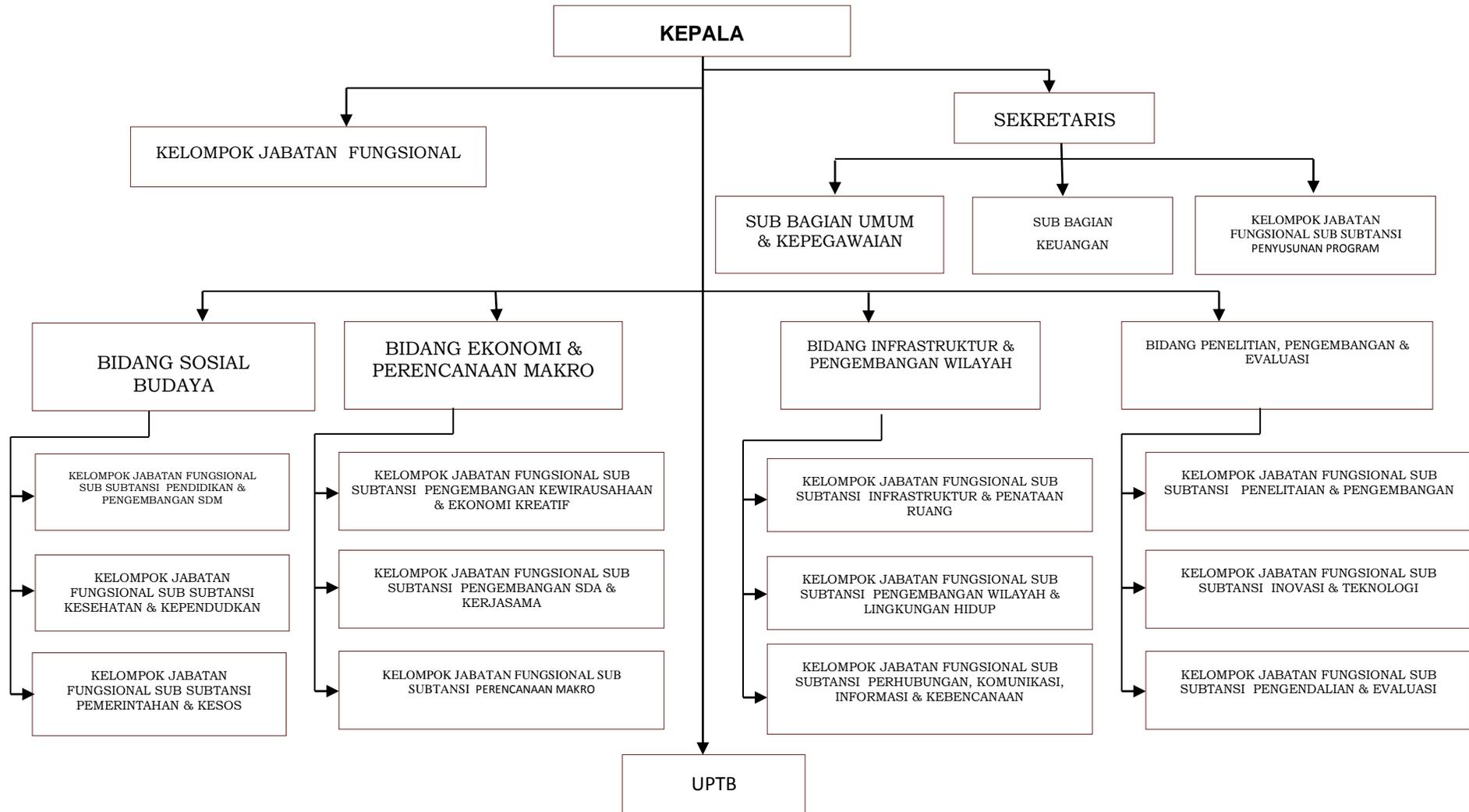
1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka urusan perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana, yang proses dan produknya ditata dan dirumuskan dengan sistematis berdasarkan kerangka pemikiran logis dan obyektif. Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Bappeda yang dipimpin oleh pejabat eselon II.b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyusunan Program
3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :



- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Kesehatan dan Kependudukan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro, terdiri dari :
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengembangan Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengembangan SDA dan Kerjasama;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perencanaan Makro.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan
6. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi terdiri dari :
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penelitian dan Pengembangan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Inovasi dan Teknologi;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengendalian dan Evaluasi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh



### **1.3 Isu Strategis**

Isu strategis Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan pada tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kualitas Perencanaan
2. Belum optimalnya Tingkat Capaian Kinerja Pembangunan
3. Belum optimalnya Kualitas Kelitbangan

### **1.4 Landasan Hukum**

LKjIP Bappeda Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**



Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis  
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

#### BAB IV PENUTUP



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

RPJMD Pemerintah Kota Payakumbuh merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **2.1. Perencanaan Strategis sebelum Reviu**

##### **A. Rencana Strategis Bappeda**

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kota Payakumbuh dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

Pada Tahun 2021, Bappeda Kota Payakumbuh melaksanakan Review Rencana Strategis (Review Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 terkait dengan nomenklatur program menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri



Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan.

Penyusunan Renstra Bappeda mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat 1, dimana bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat (1) dan (2).

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dari sisi perencanaan telah dilakukan serangkaian perubahan terhadap peraturan di bawahnya guna menjawab kebutuhan akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai pengganti Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas. Renstra Bappeda Kota Payakumbuh, tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang memuat program dan kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan dan statistik dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Renstra ini disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Penyusunan perencanaan juga didasarkan pada



analisis terhadap evaluasi pembangunan daerah yang sudah berjalan dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengendalian pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip “*money follow program priority*”.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Dalam penetapan visi, Bappeda Kota Payakumbuh harus mengacu kepada visi Kota Payakumbuh serta memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 adalah “**Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang**”

Memperhatikan visi Kota Payakumbuh tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencanaan di masa yang akan datang, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : “**Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi, Inovatif, dan Berkelanjutan**”.

Dari pernyataan visi di atas terkandung makna menjadikan Bappeda sebagai lembaga perencana profesional yang mampu melahirkan perencanaan yang memenuhi kaidah sebagai berikut :

1. **Perencanaan yang terintegrasi**, dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh disusun dengan menggabungkan kebutuhan melalui seluruh pendekatan (politik, *bottom-up/ top-down*, partisipatif dan teknokratik) dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. **Perencanaan yang inovatif**, dimaksudkan bahwa perencanaan bersifat fleksibel untuk mengadopsi inovasi – inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pembangunan daerah menghasilkan perencanaan yang lebih baik kedepannya.
3. **Perencanaan Berkelanjutan**, dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan antara periode sebelumnya



dengan periode sekarang dan yang akan datang dimana periode sebelumnya menjadi dasar untuk periode berikutnya

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat;

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis setelah dilakukan review dokumen perencanaan yang disarankan oleh Kemenpan RB



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Sebelum Reviu**

| No  | Tujuan   | Indikator Tujuan   | Target Kinerja Tujuan | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja Sasaran |        |        |        |        |        |
|-----|--|--|-----------------------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |  |                       |   |   | 2017                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                   | (5)   | (6)   | (7)                    | (8)    | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   |
| 1   | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan. | Persentase Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercapai atau melebihi target | 97,22%                | Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;     | Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat | 31,00%                 | 32,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% | 36,00% |
|     |  |  |                       | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan       | Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD                      | 94,08%                 | 95,21% | 95,24% | 97,04% | 98,20% | 98,80% |
|     |  |  |                       | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah | Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target                   | 85,31%                 | 87,78% | 89,44% | 91,67% | 93,39% | 97,22% |
|     |  |  |                       | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda      | Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat                                   | BB                     | BB     | A      | A      | A      | A      |



| No  | Tujuan  | Indikator Tujuan                         | Target Kinerja Tujuan | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja Sasaran |        |        |        |        |        |
|-----|---|--|-----------------------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |   |  |                       |   |   | 2017                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| (1) | (2)   | (3)                                      | (4)                   | (5)   | (6)   | (7)                    | (8)    | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   |
| 2   | Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 95,00%                | Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah | Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan | 60,00%                 | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00% | 95,00% |



**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Setelah Reviu**

| No | Tujuan  | Indikator Tujuan                         | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                  | Indikator Kinerja Sasaran                    | Realisasi Kinerja Sasaran |      |      | Target Kinerja Sasaran |      |      |
|----|---|--|-----------------------|--|--|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|
|    |   |  |                       |  |  | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020                   | 2021 | 2022 |
| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5  | 6  | 7                         | 8    | 9    | 10                     | 11   | 12   |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan                           | Indeks Perencanaan Pembangunan           | 71                    | Meningkatnya kualitas perencanaan        | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan     | -                         | -    | -    | -                      | 28   | 29   |
|    |   |  |                       | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja | -                         | -    | -    | -                      | 18   | 20   |
| 2. | Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 95,00%                | Meningkatnya kualitas kelitbangan        | Indeks inovasi daerah                        | -                         | -    | -    | -                      | 8200 | 8300 |

## B. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Sebelum Reviu**

| No  | Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Satuan | Penjelasan   |  |                                      | Keterangan /Kriteria   |
|-----|--|---|--------|--|--|--------------------------------------|--|
|     |  |   |        | Alasan   | Formulasi / rumus perhitungan  | Sumber data                          |  |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)  | (6)  | (7)                                  | (8)  |
| 1   | Meningkatnya perencanaan yang partisipatif | Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat | %      | Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2018 yang mengharuskan perencanaan secara bottom-up sebagai salah satu komponen perencanaan   | Pagu belanja langsung dari usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD dibagi total pagu belanja langsung RKPD dikali 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Pagu belanja langsung perencanaan bottom-up minimal 30% dari total belanja langsung          |
| 2   | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan  | Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD                | %      | Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2018 yang mengharuskan perencanaan secara teknokratis sebagai salah satu komponen perencanaan | Jumlah program RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun (n+1) dikali 100 %                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Konsistensi perencanaan tahunan (RKPD) terhadap perencanaan lima tahunan (RPJMD) minimal 95% |
| 3   | Meningkatnya                               | Persentase indikator  | %      | Sesuai dengan Permendagri  | Jumlah Indikator   | Badan Perencanaan                    | Indikator RPJMD yang   |



| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Satuan | Penjelasan  |  |                                      | Keterangan /Kriteria   |
|----|---|---|--------|---|--|--------------------------------------|--|
|    |   |   |        | Alasan  | Formulasi / rumus perhitungan  | Sumber data                          |  |
|    | capaian kinerja pembangunan daerah  | kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target                          |        | No. 86 Tahun 2018 terdapat indikator kinerja yang harus dicapai dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari capaian misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 | RPJMD tahun-n yang tercapai atau melebihi target dibagi total jumlah IKD dikali 100%   | Pembangunan Daerah                   | tercapai diukur dengan kriteria persentase capaian kinerja IKU & IKD minimal 91% dari target yang ditetapkan   |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda  | Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat                             | Nilai  | Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  | Hasil Penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat  |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah | Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan | %      | Sesuai dengan Permendagri No.86 tahun 2018 untuk indikator kelitbangan  | Jumlah hasil kelitbangan yang menjadi dasar kebijakan daerah tahun-n dibagi total jumlah hasil kelitbangan 2 tahun sebelumnya (tahun n-1 ditambah tahun n-2) dikali 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Hasil kelitbangan yang diukur adalah yang memenuhi kriteria: 1. Hasil kelitbangan yang melibatkan tenaga peneliti baik yang berasal dari fungsional peneliti/ tenaga ahli dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian; 2. Minimal 50% dari hasil kelitbangan yang memenuhi kriteria poin 1 harus dijadikan dasar |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Penjelasan |                               |             | Keterangan /Kriteria |
|----|-------------------|-------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
|    |                   |                               |        | Alasan     | Formulasi / rumus perhitungan | Sumber data |                      |
|    |                   |                               |        |            |                               |             | rumusan kebijakan    |

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

| No  | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)                | Satuan | Penjelasan   |  |             | Keterangan /Kriteria   |
|-----|--|--|--------|--|--|-------------|--|
|     |  |  |        | Alasan   | Formulasi / rumus perhitungan  | Sumber data |  |
| (1) | (2)                                      | (3)  | (4)    | (5)  | (6)  | (7)         | (8)  |
| 1   | Meningkatnya kualitas perencanaan        | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan     | Nilai  | Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN&RB No. 53 Tahun 2014   | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen perencanaan    | KemenPAN-RB | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen perencanaan     |
| 2   | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja | Nilai  | Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN&RB No. 53 Tahun 2014  | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh olehKemenPAN-RB untuk komponen capaian kinerja | KemenPAN-RB | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen capaian kinerja |
| 3   | Meningkatnya kualitas kelitbangan        | Indeks Inovasi Daerah                        | Indeks | Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No.104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian DalamNege ri                                | Kemendagri  | Indeks Inovasi Daerah  |



### **C. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh 2022**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis                          | IKU / Indikator Kinerja                       | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas perencanaan          | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan      | Nilai  | 29     |
| 2.  | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan   | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja  | Nilai  | 20     |
| 3.  | Meningkatnya kualitas kelitbangan          | Indeks Inovasi Daerah                         | Indeks | 8300   |
| 4.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda | Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat | Nilai  | A      |

## **2.2. Perencanaan Strategis**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja badan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2022, sebagai berikut

### **A. Rencana Strategis Hasil Reviu**

Hasil reviu pada rencana strategis badan berupa menambahkan indikator kinerja pada beberapa sasaran strategis badan sehingga lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja dan bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh, berdasarkan reviu juga terdapat perubahan indikator kinerja Utama Bappeda yaitu Nilai



Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan, Nilai Evaluasi AKIP Komponen Capaian Kinerja dan Indeks Inovasi Daerah. Ketiga indikator tersebut akan diukur dan diperhitungkan pada laporan kinerja tahun 2022, sedangkan tahun 2022 ini mengukur 3 indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Bappeda tersebut dituangkan dalam rancangan Perubahan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Sebelum Reviu**

| No | Tujuan   | Indikator Tujuan  | Target Kinerja Tujuan | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran   | Realisasi Kinerja Sasaran |         |         | Target Kinerja Sasaran |         |         |
|----|--|---|-----------------------|--|---|---------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
|    |  |   |                       |  |   | 2017                      | 2018    | 2019    | 2020                   | 2021    | 2022    |
| 1  | 3  | 4   | 5                     | 6  | 7   | 9                         | 10      | 11      | 12                     | 13      | 14      |
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah     | Persentase Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercapai dan melebihi target | 97,22%                | Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;                                | Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat | 31.24 %                   | 33.08 % | 33.11 % | -                      | -       | -       |
|    |  |   |                       |  | Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat          | -                         | -       | -       | 17,00                  | 17,50 % | 18,00 % |
|    |  |   |                       | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan                                  | Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD                      | 94.08 %                   | 92.24 % | 88.76 % | 97,04 %                | 98,20 % | 98,80 % |
|    |  |   |                       |  | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan  | -                         | -       | -       | -                      | 28      | 29      |
|    |  |   |                       | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah                            | Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target                   | 83.29 %                   | 78.57 % | 89.88 % | 91,67 %                | 93,39 % | 97,22 % |
|    |  |   |                       |  | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja                                    | -                         | -       | -       | -                      | 18      | 20      |
|    |  |   |                       | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda                                 | Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat                                   | A                         | A       | A       | A                      | A       | A       |
| 2  | Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas | Persentase pemanfaatan hasil kelitbang  | 95,00%                | Meningkatnya kualitas hasil kelitbang dalam perumusan kebijakan pemerintah | Persentase hasil kelitbang yang dijadikan dasar dalam perumusan                 | 80.00 %                   | 85.71 % | 90.91 % | 85,00 %                | 90,00 % | 95,00 % |



| No | Tujuan         | Indikator Tujuan | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi Kinerja Sasaran |      |      | Target Kinerja Sasaran |      |      |
|----|----------------|------------------|-----------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|
|    |                |                  |                       |         |                           | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020                   | 2021 | 2022 |
| 1  | 3              | 4                | 5                     | 6       | 7                         | 9                         | 10   | 11   | 12                     | 13   | 14   |
|    | dan bermanfaat |                  |                       | daerah  | kebijakan                 |                           |      |      |                        |      |      |
|    |                |                  |                       |         | Indeks Inovasi Daerah     | -                         | -    | -    | -                      | 500  | 800  |

**Tabel 2.7**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Setelah Reviu**

| No | Tujuan  | Indikator Tujuan                         | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                  | Indikator Kinerja Sasaran                    | Realisasi Kinerja Sasaran |      |      | Target Kinerja Sasaran |      |      |
|----|---|--|-----------------------|--|--|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|
|    |   |  |                       |  |  | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020                   | 2021 | 2022 |
| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5  | 6  | 7                         | 8    | 9    | 10                     | 11   | 12   |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan                           | Indeks Perencanaan Pembangunan           | 71                    | Meningkatnya kualitas perencanaan        | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan     | -                         | -    | -    | -                      | 28   | 29   |
|    |   |  |                       | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja | -                         | -    | -    | -                      | 18   | 20   |
| 2. | Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 95,00%                | Meningkatnya kualitas kelitbangan        | Indeks inovasi daerah                        | -                         | -    | -    | -                      | 8200 | 8300 |



## B. Indikator Kinerja Utama

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Bappeda juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Bappeda hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 2.8**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

| NO | SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | SATUAN | PENJELASAN   |   |             | KETERANGAN/<br>KRITERIA                                      |
|----|--|--|--------|--|---|-------------|--|
|    |  |  |        | ALASAN   | FORMULASI/CARA PENGUKURAN   | SUMBER DATA |  |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan        | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan     | Nilai  | Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN& RB No. 53 Tahun 2014  | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen perencanaan     | KemenPAN-RB | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen perencanaan     |
| 2. | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja | Nilai  | Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN& RB No. 53 Tahun 2014   | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen capaian kinerja | KemenPAN-RB | Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen capaian kinerja |
| 3. | Meningkatnya kualitas kelitbangan        | Indeks Inovasi Daerah                        | Indeks | Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No.104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian DalamNegeri                                  | Kemendagri  | Indeks Inovasi Daerah  |

## C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2022 diperjanjikan antara Kepala Badan dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.9**  
**Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis                        | IKU / Indikator Kinerja                      | Satuan | Target |
|----|--|--|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan        | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan     | Nilai  | 29     |
| 2  | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja | Nilai  | 20     |
| 3  | Meningkatnya kualitas kelitbangan        | Indeks Inovasi Daerah                        | Indeks | 8300   |

Dalam pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kota Payakumbuh di dukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

| No       | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Anggaran      |
|----------|--|---------------|
| <b>1</b> | <b>A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b> |               |
|          | 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah          |               |
|          | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 12,293,600    |
|          | 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 133,526,630   |
|          | <b>b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      |               |
|          | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 4,703,851,233 |
|          | <b>c Administrasi Kepegawaia Perangkat Daerah</b>                    |               |
|          | 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya                     | 23,909,400    |
|          | 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan       | 42,950,000    |
|          | <b>d Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          |               |



| No | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran    |
|----|--|-------------|
|    | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 5,553,010   |
|    | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 370,536,570 |
|    | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 4,722,830   |
|    | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 36,401,710  |
|    | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | 18,584,040  |
|    | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan   | 20,487,720  |
|    | 7 Fasilitas Kunjungan Tamu   | 5,250,000   |
|    | 8 Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 579,980,000 |
|    | 9 Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 67,380,570  |
|    | e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |             |
|    | 1 Pengadaan Mebel  | 51,276,790  |
|    | 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 20,165,740  |
|    | f Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |             |
|    | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2,240,000   |
|    | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 58,102,714  |
|    | 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 111,358,128 |
|    | g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |             |
|    | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39,190,000  |
|    | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan    | 179,300,000 |



| No       | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Anggaran    |
|----------|---|-------------|
|          | 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 58,000,000  |
|          | 4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                | 135,363,000 |
| <b>2</b> | <b>B Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                      |             |
|          | a Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  |             |
|          | 1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 29,184,780  |
|          | 2 Pelaksanaan Konsultasi Publik   | 35,249,020  |
|          | 3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota   | 95,567,560  |
|          | 4 Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan  | 18,226,590  |
|          | 5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota   | 639,261,680 |
|          | b Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          |             |
|          | 1 Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | 128,307,860 |
|          | 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                     | 121,163,430 |
|          | c Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    |             |



| No       | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran    |
|----------|--|-------------|
|          | 1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | 42,030,020  |
| <b>3</b> | <b>C Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |             |
|          | a Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   |             |
|          | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD ).                            | 7,691,770   |
|          | 2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD )                      | 7,472,400   |
|          | 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 51,617,660  |
|          | 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                  | 326,572,190 |
|          | b Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )  |             |
|          | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD)                             | 5,428,800   |
|          | 2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD)                                      | 5,753,020   |
|          | c Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  |             |
|          | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD)                            | 8,559,930   |



| No       | Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran             |
|----------|--|----------------------|
|          | 2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur              | 205,534,730          |
|          | 3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD)          | 93,919,870           |
|          |  |                      |
| <b>4</b> | <b>D Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>  |                      |
|          | a Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan   |                      |
|          | 1 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  | 79,749,900           |
|          | b Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   |                      |
|          | 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | 92,956,260           |
|          | c Pengembangan Inovasi dan Teknologi   |                      |
|          | 1 Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi | 263,684,600          |
|          | 2 Diseminasi jenis, prosedur, dan metode yang di seminasikan / disosialisasikan                                      | 28,395,560           |
|          | 3 Sosialisasi dan diseminasi hasil - hasil kelitbangan   | 27,938,070           |
|          |  | <b>8.994.689.385</b> |



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran



atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Prediket Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

| <b>NO.</b> | <b>Kategori</b> | <b>Rata-Rata % Capaian</b> |
|------------|-----------------|----------------------------|
| 1          | Sangat Baik     | > 90                       |
| 2          | Baik            | 75.00 – 89.99              |
| 3          | Cukup           | 65.00 – 74.99              |
| 4          | Kurang          | 50.00 – 64.99              |
| 5          | Sangat Kurang   | 0 – 49.99                  |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Payakumbuh Nomor : 065/026 /Bappeda-Ko/2022, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- ✚ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ✚ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- ✚ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**



Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Bappeda Payakumbuh Nomor : 065/48/Bappeda-Ko/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Payakumbuh Nomor : 065/026/Bappeda-Ko/2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022**

| No | Indikator Kinerja Utama                  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan        | nilai  | 29     | 24,19     | 83,41     |
| 2  | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | nilai  | 20     | 15*       | 75,00     |
| 3  | Meningkatnya kualitas kelitbangan        | indeks | 8300   | 9582      | 115,44    |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi / melampaui target ditunjukkan pada indikator Meningkatkan kualitas kelitbangan dengan capaian kinerja 115,44



capaian kinerja sesuai target ditunjukkan pada indikator meningkatnya kualitas perencanaan dengan capaian kinerja 85,41%, dan indikator meningkatnya capaian kinerja pembangunan dengan capaian kinerja 75,00% ( Mengingat persentase indikator RPJMD yang tercapai 97.22, maka diasumsikan nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja 15 ) nilai evaluasi LHE untuk tahun 2022 dari kemenangan RB dikeluarkan bulan maret 2023

### A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 setelah sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh adalah seperti tabel 3.3

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2022**

| NO. | Sasaran Strategis         | Capaian |
|-----|---------------------------|---------|
| 1   | Melebihi/Melampaui Target | 1 buah  |
| 2   | Sesuai Target             | 2 buah  |

Adapun pencapaian target misi dengan 3 (tiga) Sasaran diatas dirinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Target Misi**

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian       |   |                      |   |                               |   |  |  |  |
|----|------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|
|    |      |                          | Melampaui target (>100%) |   | Sesuai Target (100%) |   | Belum Mencapai Target (<100%) |   |  |  |  |
|    |      |                          | Jumlah                   | % | Jumlah               | % | Jumlah                        | % |  |  |  |
|    |      |                          |                          |   |                      |   |                               |   |  |  |  |



|   |  |   |   |     |   |     |   |   |
|---|--|---|---|-----|---|-----|---|---|
| 1 | Memantapkan penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif | 2 | - | -   | 2 | 100 |   |   |
| 2 | Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat   | 1 | 1 | 100 | - | -   | - | - |

Dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

| No.       | Kategori                  | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| <b>A.</b> | <b>Misi 1</b>             |                  |            |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | -                | -          |
| 2         | Sesuai Target             | 2                | 100        |
| 3         | Tidak Mencapai Target     |                  |            |
| <b>B.</b> | <b>Misi 2</b>             |                  |            |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | 1                | 100        |
| 2         | Sesuai Target             | -                | -          |
| 3         | Tidak Mencapai Target     | -                | -          |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### **Sasaran 1** **Meningkatnya Kualitas Perencanaan**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan**

| <b>NO</b> | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                 | <b>SATUAN</b> | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN</b> | <b>KATEGORI</b> |
|-----------|--|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1         | 3  | 4             | 5             | 6                | 7              |                 |
| <b>1</b>  | Nilai Evaluasi AKIP komponen perencanaan | Nilai         | 29            | 24,19            | 83,41          | BAIK            |

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan. Indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen perencanaan



Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan adalah sebesar 24,19 dari target sebesar 29 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 83,41 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Dalam mengevaluasi Indikator Kinerja Utama, digunakan interpretasi nilai realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , sehingga memudahkan dalam memahami capaian kinerja kinerja.

Dalam Penilaian kinerja tersebut, skala kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi; menunjukkan pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- 2) Hasil Sedang; menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah; menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



**Tabel 3.7**

**Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai**

| No    | Komponen            | Bobot | Sub Komponen  |
|-------|---------------------|-------|---|
| 1     | Perencanaan Kinerja | 30%   | a. Rencana Strategis (10%), meliputi :<br>Pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) |
|       |                     |       | b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).      |
| 2     | Pengukuran Kinerja  | 25%   | a. Pemenuhan pengukuran (5%)  |
|       |                     |       | b. Kualitas Pengukuran (12,5%)  |
|       |                     |       | c. Implementasi pengukuran (7,5%)   |
| 3.    | Pelaporan Kineja    | 15%   | a. Pemenuhan pelaporan (3%)   |
|       |                     |       | b. Kualitas pelaporan (7,5%)  |
|       |                     |       | c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)   |
| 4.    | Evaluasi Internal   | 10%   | a. Pemenuhan evaluasi (2%)  |
|       |                     |       | b. Kualitas evaluasi (5%)   |
|       |                     |       | c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3% )   |
| 5.    | Capaian Kinerja     | 20%   | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)  |
|       |                     |       | b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)  |
|       |                     |       | c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)  |
| Total |                     | 100%  |   |

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.8**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran dan Output yang**  
**Dihasilkan Sesuai Sasaran 1**

| No  | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan  | Pagu Anggaran (Rp)  | Realisasi Anggaran (Rp)  | Output               | Menujang /Kurang |
|---|--|---|---|---|--|----------------------|------------------|
| 1   | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | 95.567.560  | 89.376.850   | 1 hari               | Menunjang        |
|   |  |   | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | 18.226.590  | 17.810.540   | 5 bahan              | Menunjang        |
|   |  |   | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | 35.249.020  | 35.066.280   | 110 orang            | Menunjang        |
|   |  |   | Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya | 29.184.780  | 27.940.900   | - 31 OPD<br>- 6 kali | Menunjang        |
|   |  |   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota   | 639.261.680   | 637.653.730  | - 5 kali             | Menunjang        |
|   |  | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 128.307.860   | 122.214.730   | 2 dokumen  | Menunjang            |                  |
|   |  | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD             | 121.163.430   | 119.078.724   | 2 orang  | Menunjang            |                  |
|   |  | 2   | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah                            | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5.428.800            | 5.314.000        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5.753.020  |   |   |   | 5.518.650  | 4 kali rapat         | Menunjang        |
|   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |   |   | 7.691.770   | 7.197.480  | 4 kali rapat         | Menunjang        |



| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan  | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Output          | Menujang /Kurang |
|----|---------|----------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|    |         |          | dan RKPD)   |                    |                         |                 |                  |
|    |         |          | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Infrastruktur<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | 8.559.930          | 7.991.340               | 4 kali<br>rapat | Menunjang        |

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor pendukung :**

1. Adanya regulasi yang jelas tentang penyusunan dan batas waktu penyelesaian dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.
2. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui rapat teknis dengan perangkat daerah dalam menselaraskan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra perangkat daerah dan RPJMD.
3. Makin meningkatnya usulan masyarakat yang mendapatkan tempat pada setiap program pembangunan di kota Payakumbuh;
4. Fasilitator perencana yang dilatih mampu mengarahkan usulan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;

**Faktor Penghambat :**

Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) belum seluruhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang smart. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut



**Tabel 3.9**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1**

| No  | Sasaran                           | Indikator                                   | Satuan | Kinerja |           |       | Keuangan                                  |  |               |               |                          |
|---|-----------------------------------|---|--------|---------|-----------|-------|---|--|---------------|---------------|--------------------------|
|   |                                   |   |        | Target  | Realisasi | (%)   | Program                                   | Pagu   | Realisasi     | %             |                          |
| 1   | Meningkatnya kualitas perencanaan | 1. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan | Nilai  | 29      | 24,19     | 83,41 | 1   | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 1.066.960.920 | 1.049.141.754 | 98,32                    |
|   |                                   |   |        |         |           |       | 2   | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 27.433.520    | 26.021.470    | 84,85                    |
|   |                                   |   |        |         |           |       | <b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b> |  |               | <b>83,41</b>  | <b>TOTAL PER SASARAN</b> |
| <b>TINGKAT <u>EFISIENSI</u> -14,83 %</b>  |                                   |   |        |         |           |       |   |  |               |               |                          |
| <b>TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 86,74 %</b> |                                   |   |        |         |           |       |   |  |               |               |                          |

Dari Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran 1 : meningkatnya kualitas perencanaan , didukung oleh 2 (dua) program yaitu program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Capaian Kinerja dari indikator sebesar 83,41 % sedangkan capaian keuangan dari kedua program yang mendukungnya yaitu 98,24%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar -14,83%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 84,90%.

Nilai capaian kinerja ini masih menggunakan data terakhir di tahun 2022 karena nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2022 baru keluar di bulan maret tahun 2023



### Solusi/Strategi pemecahan masalah :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja berkualitas, serta menciptakan harmonisasi perencanaan dan penjabaran kinerja mengacu pada kerangka logis yang telah disusun sampai ke level individu
2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan
3. Memprioritaskan penghapusan program / kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka refocusing program/kegiatan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

Sasaran 2  
Meningkatnya capaian kinerja pembangunan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya capaian kinerja pembangunan**

| NO. | INDIKATOR KINERJA                            | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KATEGORI |
|-----|--|--------|--------|-----------|---------|----------|
| 1   | 3  | 4      | 5      | 6         |         | 7        |
| 1   | Nilai Evaluasi AKIP Komponen Capaian Kinerja | Nilai  | 20     | 15,00     | 75,00   | BAIK     |

Sasaran meningkatnya capaian kinerja pembangunan dapat dilihat dari indikator : Nilai evaluasi AKIP Komponen Capaian Kinerja.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 terdapat 10 sasaran strategis untuk mencapai visi – misi Kepala Daerah dengan 25 Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama digambarkan dalam tabel



Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Sasaran Strategis |   | Indikator Sasaran |   | Satuan        | Target | Realisasi | %      |
|-------------------|---|-------------------|---|---------------|--------|-----------|--------|
| 1                 | Meningkatnya kualitas pendidikan                            | 1                 | Angka rata – rata lama sekolah                            | Tahun         | 10,79  | 10,82     | 99,27  |
| 2                 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat                  | 2                 | Angka usia harapan hidup                                  | 73,90         | 74,50  | 74,14     | 99,52  |
| 3                 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                         | 3                 | Indeks pemberdayaan gende (IDG)                           | Tahun         | 62,37  | 71,51*    | 114,65 |
| 4                 | Meningkatnya penanggulangan kemiskinan                      | 4                 | Tingkat kemiskinan  | %             | 5,27   | 5,66      | 93,11  |
|                   |   | 5                 | Tingkat pengangguran                                      | %             | 5,80   | 5,16      | 112,40 |
| 5                 | Meningkatnya produktivitas sektor strategis                 | 6                 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRE               | %             | 24,17  | 24,70*    | 102,19 |
|                   |   | 7                 | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB             | %             | 6,12   | 6,01*     | 98,20  |
|                   |   | 8                 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB                 | %             | 7,47   | 6,11*     | 81,79  |
|                   |   | 9                 | Persentase peningkatan kunjungan wisata                   | %             | 7,50   | 7,55      | 100,67 |
| 6                 | Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh   | 10                | Nilai realisasi investasi                                 | Miliar rupiah | 203,8  | 199,7     | 97,99  |
|                   |   | 11                | Persentase usaha kecil menengah terhadap UMKM             | %             | 2,5    | 14,95     | 598,00 |
| 7                 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan | 12                | Persentase pelayanan air minum                            | %             | 100    | 99,18     | 99,18  |
|                   |   | 13                | Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap | %             | 77,31  | 84,06     | 108,73 |
|                   |   | 14                | Persentase sistem drenase                                 | %             | 64,40  | 63,64     | 98,82  |



| Sasaran Strategis |   | Indikator Sasaran  | Satuan | Target | Realisasi | %       |
|-------------------|---|--|--------|--------|-----------|---------|
|                   |   | skala kota   |        |        |           |         |
|                   |   | 15 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang   | %      | 80,10  | 80,06     | 99,95   |
|                   |   | 16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan                                    | %      | 71,98  | 71,61     | 99,49   |
| 8                 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup          | 17 Indeks kualitas lingkungan hidup  | Nilai  | 58,00  | 64,18     | 110,66  |
|                   |   | 18 Persentase luas permukiman kumuh  | %      | 0,30   | 0         | 130,00  |
| 9                 | Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan | 19 Nilai evaluasi AKIP Kota  | Nilai  | A      | BB        | 100,00  |
|                   |   | 20 Opini BPK   | Opini  | WTP    | WTP       | 100     |
|                   |   | 21 Indeks SPBE   | Indeks | 3,00   | 3,02      | 100,67  |
|                   |   | 22 Indeks pelayanan publik   | Indeks | 4,51   | A         | 100,00  |
| 10                | Meningkatnya pengamalan ajaran agama            | 23 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik                      | %      | 51,06  | 90        | 176,26  |
|                   |   | 24 Persentase peningkatan zakat / wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga zakat / wakaf | %      | 5      | 116,29    | 2325,80 |
|                   |   | 25 Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai - nilai budaya          | %      | 100,00 | 100,00    | 100     |

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 25 indikator kinerja utama ( IKU), semua indikator kinerja utama tercapai.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**



**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai  
Sasaran 2**

| No | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Output       | Menujang /Kurang |
|----|--|--|--|--------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | 42.030.020         | 39.478.170              | 1 dokumen    | Menunjang        |
| 2  | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 7.472.400          | 6.711.600               | 4 kali rapat | Menunjang        |
|    |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 51.617.660         | 49.829.130              | 2 pelaporan  | Menunjang        |
|    |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 326.572.190        | 326.110.654             | 1 dokumen    | Menunjang        |
|    |  |  |  |                    |                         |              |                  |
|    |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                      | 205.534.730        | 196.718.750             | 4 kali rapat | Menunjang        |
|    |  |  | Koordinasi Penyusunan  | 93.919.870         | 90.177.800              | 5 kali rapat | Menunjang        |



|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan<br>(RPJPD,<br>RPJMD dan<br>RKPD) |  | 0 |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor pendukung :**

Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah baik namun tetap memerlukan penyempurnaan hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Payakumbuh sudah mulai terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh



**Tabel 3.13**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2**

| No                                       | Sasaran                                  | Indikator                                       | Satuan | Kinerja |           |              | Keuangan                                  |  |              |                          |                    |
|--|--|---|--------|---------|-----------|--------------|---|--|--------------|--------------------------|--------------------|
|  |  |   |        | Target  | Realisasi | (%)          | Program                                   | Pagu   | Realisasi    | %                        |                    |
| 2  | Meningkatnya capaian kinerja pembangunan | 2.1<br>Evaluasi nilai AKIP Komponen Perencanaan | %      | 20      | 11,51     | <b>57,55</b> | 1   | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 42.030.020   | 39.478.170               | 93,92              |
|  |  |   |        |         |           |              | 2   | koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 685.116.850  | 579.370.134              | 84,56              |
|  |  |   |        |         |           |              | <b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b> |  | <b>57,55</b> | <b>TOTAL PER SASARAN</b> | <b>727.146.870</b> |
| <b>TINGKAT <u>EFISIENSI</u> -27,55 %</b> |  |   |        |         |           |              |   |  |              |                          |                    |
| <b>TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 65,66%</b> |  |   |        |         |           |              |   |  |              |                          |                    |



Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.13, dimana tingkat efisiensi berada pada nilai -27,55%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja 57,55% sedangkan capaian anggaran 85,10% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 2 sebesar 66,62%.

#### **Solusi/Strategi pemecahan masalah :**

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi :

1. Memperbaiki indikator kinerja individu yang masih berorientasi pada aktivitas rutin menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dalam peningkatan kinerja. Melalui perbaikan tersebut, reward dan punishment diterapkan melalui aplikasi pengukuran kinerja individu disesuaikan dengan besaran kontribusi kinerja yang diberikan setiap individu pegawai bagi organisasinya
2. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam peningkatan kinerja

#### **Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Kelitbangan**

Sasaran 3 berupa Meningkatnya kualitas kelitbangan, diukur dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.



Inovasi merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Dari realisasi kinerja dan keuangan kota Payakumbuh tahun 2022, dilakukan akselerasi melalui beberapa inovasi pada tahun 2022 dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung masyarakat di Kota Payakumbuh. Dengan sumberdaya yang tersedia, pelayanan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan.

Daftar dan jenis inovasi yang telah dilahirkan di Kota Payakumbuh selama Tahun 2022

**Tabel 3.14**  
**DATA PENGINPUTAN INOVASI PERANGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>  | <b>Bentuk Inovasi</b>   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>   | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|---|---|--------------|------------------|--|-------------------|------------------------|
| 1         | MALL PELAYANAN PUBLIK NEW NORMAL  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | penanaman modal  | 97                | Penerapan              |
| 2         | GARENDONG "ABAKKU" (AMAN BELANJA ANTAR KERUMAH KUJAMIN)                   | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | perdagangan  | 94                | Penerapan              |
| 3         | CAFE & RESTO NEW NORMAL   | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Digital      | Masyarakat       | perdagangan  | 97                | Penerapan              |
| 4         | PUSAT PERBELANJAAN MODERN NEW NORMAL                                      | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Digital      | OPD              | perdagangan  | 97                | Penerapan              |
| 5         | SI CECE URUS KAKEKKU (SIAP CERAI CEPAT URUS KARTU KELUARGA DAN KTP-el KU) | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil                         | 101               | Penerapan              |
| 6         | "LAYANAN KASIH"   | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | ASN              | kesehatan  | 94                | Penerapan              |
| 7         | " LAKON PESEK" Layanan Konsultasi Pengelolaan Aset Sekolah                | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Non Digital  | OPD              | pangan,pertanian   | 100               | Penerapan              |
| 8         | POL PP GO TO SCHOOL (PGTS)  | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pendidikan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 97                | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>  | <b>Bentuk Inovasi</b>   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>  | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|---|---|--------------|------------------|---|-------------------|------------------------|
| 9         | POL PP BERSERAGAM (Berdayakan Tokoh Adat dan Agama)   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat                    | 100               | Penerapan              |
| 10        | JEMPOL TEMAN (JEMPUT BOLA TEMUI PEMOHON DI LAPANGAN)  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 99                | Penerapan              |
| 11        | SINGATUR  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | pekerjaan umum dan penataan ruang   | 94                | Penerapan              |
| 12        | GEMULAI (Gemar Menanam Varietas Marapulai)  | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 95                | Penerapan              |
| 13        | SISTIM INFORMASI PERTANIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (SITANILP2B)                  | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 96                | Penerapan              |
| 14        | EDU MINA  | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 92                | Penerapan              |
| 15        | AKSI CEPAT TANGGAP PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (SIGAP PANDEMI) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 93                | Penerapan              |
| 16        | Puskesmas Siaga, Gratis, Pelayanan Prima (Puskesmas Sigap)                                    | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 93                | Penerapan              |
| 17        | BLUTUT PATEN (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK)                     | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 95                | Penerapan              |
| 18        | “ E-RETRIBUSI PASAR PAYAKUMBUH “  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | koperasi, usaha kecil, dan menengah   | 97                | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>  | <b>Bentuk Inovasi</b>                   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>                       | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|---|---|--------------|------------------|--|-------------------|------------------------|
|           | (KOPERSAI UMKM)   |   |              |                  |  |                   |                        |
| 19        | HALLO PASKOPAY (Hotline Center Pasar)<br>PROGRAM RANCANGAN INOVASI DAERAH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH                  | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Non Digital  | OPD              | koperasi, usaha kecil, dan menengah            | 99                | Penerapan              |
| 20        | (SIHARKO)SISTIM INFORMASI HARGA KOMODITI  | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Digital      | OPD              | koperasi, usaha kecil, dan menengah            | 94                | Penerapan              |
| 21        | (SILAKEH SMART) SISTEM INFORMASI LAYANAN KESEHATAN SMART RSUD dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH   | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | kesehatan                                      | 100               | Penerapan              |
| 22        | PUBER ANAK MELANIA “PULANG BERSALIN ANAK MENDAPAT AKTA LAHIR DAN IDENTITAS ANAK”  | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | tenaga kerja                                   | 99                | Penerapan              |
| 23        | PROGRAM GESIT KEJAR DAKU “BANG” DALAM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL 91% TAHUN 2019 KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 – 18 TAHUN | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 100               | Penerapan              |
| 24        | SINI KAKEK SELEB “Siap Nikah Kartu Keluarga Dan KTP-el Selesai Dibuat”  | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 100               | Penerapan              |
| 25        | PIKIR BUNG (PELAYANAN INOVATIF KIR PERHUBUNGAN)   | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | perhubungan                                    | 99                | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>                   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>                                   | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|--|---|--------------|------------------|--|-------------------|------------------------|
| 26        | KAUR KOPAY (KAMPUNG PEMBAURAN KOTA PAYAKUMBUH)                                       | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 27        | SIAP BANPOL (SISTEM ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL)                  | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 28        | SIMASPOL (SISTEM INFORMASI ORMAS DAN PARPOL)   | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Digital      | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 29        | PETI BUNIAN LAMPOSI (Program Empati Bantu Kesejahteraan Ekonomi Anak Nagari Lamposi) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Digital      | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 30        | SIKABAN (SISTEM KONSULTASI DAN LAYANAN KEPEGAWAIAN)                                  | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Non Digital  | OPD              | Kepegawaian  | 99                | Penerapan              |
| 31        | GPS BAS (Gerakan Peduli Sungai Batang Sikali)  | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 32        | (BELALANG TEMPUR) BKPSDM LAYANAN LAPANGAN TEMUI APARATUR                             | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Non Digital  | OPD              | Kepegawaian  | 97                | Penerapan              |
| 33        | CINTA KESSING CIPTAKAN TENAGA KERJA SIAP SAING                                       | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | perindustrian  | 100               | Penerapan              |
| 34        | SUKA PALO (Suka Makan Pangan Lokal)  | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Digital      | OPD              | pertanian  | 102               | Penerapan              |
| 35        | "SEPIRA" SENTRA PRODUKSI INDUSTRI RANDANG  | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | perindustrian  | 100               | Penerapan              |
| 36        | SIAGA PASTI (Sistem Informasi Harga Pangan Pokok Strategis terintegrasi)             | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Digital      | OPD              | pangan   | 100               | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>                   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>                                   | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|--|---|--------------|------------------|--|-------------------|------------------------|
| 37        | “LIHAT BUMIL” (Lima Menit Sehat Bersama Ibu Hamil)   | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | kesehatan  | 100               | Penerapan              |
| 38        | GERAKAN BAPAK ASUH (GABAH)   | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Digital      | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 39        | SITARANG ( SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG)  | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | pekerjaan umum dan penataan ruang                          | 96                | Penerapan              |
| 40        | BRIGADE ALSINTAN TERPADU GEDE TANTE  | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | pertanian  | 91                | Penerapan              |
| 41        | KERETA ONLINE(KETERANGAN RENCANA KOTA ONLINE)  | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | pekerjaan umum dan penataan ruang                          | 92                | Penerapan              |
| 42        | TAS DIGITAL Tanah ASet DIGITAL KOTA PAYAKUMBUH   | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | pekerjaan umum dan penataan ruang                          | 90                | Penerapan              |
| 43        | SIM PKK (SISTIM INFORMASI MANAJEMEN PKK  | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | pengendalian penduduk dan keluarga berencana               | 100               | Penerapan              |
| 44        | (DAMKAR GO TO SCHOOL) Strategi Inovasi dan Edukasi Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Apar Di Sekolah | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 98                | Penerapan              |
| 45        | e-sppd (elektronik sisitem inforasi perjalanan dinas)  | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | komunikasi dan informatika                                 | 97                | Penerapan              |
| 46        | (e-Kinerja) elektronik sistem informasi kinerja  | Inovasi pelayanan publik                | Digital      | OPD              | komunikasi dan informatika                                 | 100               | Penerapan              |
| 47        | SIWARTA (SISTEM INFORMASI WARTAWAN)  | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | komunikasi dan informatika                                 | 96                | Penerapan              |
| 48        | LAYANAN KONSULTASI PUBLIK & PENGADUAN SOSIAL MASYARAKAT  | Inovasi pelayanan publik                | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa                           | 99                | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>  | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|--|---|--------------|------------------|---|-------------------|------------------------|
| 49        | (LABU MADU MAS) LAYANAN BERSAMA UNTUK MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT                             | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 82                | Penerapan              |
| 50        | SECANGKIR KOPI   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 93                | Penerapan              |
| 51        | GERAKAN FORMASI 5.9 PLUS   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 81                | Penerapan              |
| 52        | (GELIAT) Gerakan Peduli Masyarakat Payakumbuh Utara  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 90                | Penerapan              |
| 53        | RANGKUL NAGARI   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 92                | Penerapan              |
| 54        | PENANYA SIMAMAT  | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 95                | Penerapan              |
| 55        | PAUD HOI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pendidikan  | 94                | Penerapan              |
| 56        | LAKI IDA (LAYANAN KLINIK INOVASI DAERAH)   | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Non Digital  | ASN              | Perencanaan   | 90                | Penerapan              |
| 57        | "S I P E K A T" STRATEGI PEMBERDAYAAN KARYA INOVASI TEKNOLOGI  | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | ASN              | Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 91                | Penerapan              |
| 58        | "SIPADU MANTAP" "SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH PAYAKUMBUH TERPADU MELAWAN TANTANGAN PANDEMI" COVID-19 | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Non Digital  | ASN              | perindustrian   | 91                | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>    | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>  | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|--|--------------------------|--------------|------------------|---|-------------------|------------------------|
| 59        | (SIGANA) SIswa siaga bencana   | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat                    | 100               | Penerapan              |
| 60        | "SOPI LABOR" SISTEM OPERASIONAL PELAYANAN LABORATORIUM                     | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | lingkungan hidup  | 91                | Penerapan              |
| 61        | " PENTAS" PENDIDIKAN KESETARAAN DI LAPAS                                   | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | pendidikan  | 94                | Penerapan              |
| 62        | "K L I L I N G P L A N E T" KLINIK KONSELING PLANNING DAN EVALUASI TERPADU | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | Perencanaan   | 100               | Penerapan              |
| 63        | Program "Bintang Lima"   | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | pemberdayaan masyarakat dan Desa  | 94                | Penerapan              |
| 64        | TOKOK TBM ( TUNTASKAN TUNTASKAN ROKOK MELALUI TERAPHY BERHENTI MEROKOK )   | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | kesehatan   | 93                | Penerapan              |
| 65        | R U P O M O D E R U M A H POTONG MODERN                                    | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 96                | Penerapan              |
| 66        | PENYU CAROLINE PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SECARA ONLINE                    | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 96                | Penerapan              |
| 67        | ( PETANI SIAM ) Penyaluran Bantuan Tanaman Hortikultura Siap Tanam         | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | pertanian   | 100               | Penerapan              |
| 68        | YANDAS TLAN HP PELAYANAN REKOMENDASI BEBAS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 94                | Penerapan              |
| 69        | " DIARI" DIGITALISASI  | Inovasi pelayanan publik | Digital      | OPD              | kearsipan   | 94                | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>  | <b>Bentuk Inovasi</b>   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>  | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|---|---|--------------|------------------|---|-------------------|------------------------|
|           | ARSIP IJAZAH  |   |              |                  |   |                   |                        |
| 70        | KLINIK JASA KONSTRUKSI (Pelayanan Konsultasi Permasalahan Konstruksi)     | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | pekerjaan umum dan penataan ruang   | 94                | Penerapan              |
| 71        | PJU Payakumbuh TERANG   | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | pekerjaan umum dan penataan ruang   | 94                | Penerapan              |
| 72        | KASIH KADER SENTUH IBU HAMIL  | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | kesehatan   | 93                | Penerapan              |
| 73        | “SUKAMARET” (SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT REAL TIME)                        | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat                    | 99                | Penerapan              |
| 74        | POSYANDU REMAJA   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | kesehatan   | 100               | Penerapan              |
| 75        | PALEWA (Pendataan dan Pelestarian Warisan Budaya)                         | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | pariwisata  | 100               | Penerapan              |
| 76        | PUSAKO (Pusat Literasi Adat Kota Payakumbuh)                              | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | pariwisata  | 100               | Penerapan              |
| 77        | IMPRESIF (Inovasi Promosi dan Informasi Pariwisata Bersama Tim Kreatif)   | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | pariwisata  | 100               | Penerapan              |
| 78        | FASKEL (Fasilitator Kelurahan)  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | Perencanaan   | 99                | Penerapan              |
| 79        | CEK KEMARI “CEK KESEHATAN MASYARAKAT SORE HARI”                           | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | kesehatan   | 102               | Penerapan              |
| 80        | PATEN SIMDA (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Siap Melayani Anda) | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 100               | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>                                   | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|--|---|--------------|------------------|--|-------------------|------------------------|
| 81        | ASN PAYAKUMBUH BERQURBAN   | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | Kepala Daerah    | sosial   | 100               | Penerapan              |
| 82        | PEMBUATAN PAYMENT GATEWAY PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE  | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Digital      | OPD              | Keuangan   | 102               | Penerapan              |
| 83        | “ PAPA BOS” Pendampingan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah                                  | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Digital      | OPD              | pendidikan   | 100               | Penerapan              |
| 84        | SIFADWA RANCAK "Sistem Informasi Fasilitasi Administrasi Warga dan Registrasi Pencatatan Kependudukan" | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil             | 100               | Penerapan              |
| 85        | LAWAN PANDEMI  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil             | 101               | Penerapan              |
| 86        | SAPA SALAMKU (SISTEM APLIKASI PENILAIAN PELAKSANAAN PELAYANANKU)                                       | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil             | 100               | Penerapan              |
| 87        | LANSIA SEKOLAH TK (PELAYANAN LANGSUNG IDENTITAS ANAK KE SEKOLAH TERMASUK AKTA)                         | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil             | 100               | Penerapan              |
| 88        | PROKER GEBU PAYOBASUNG   | Inovasi pelayanan publik  | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 101               | Penerapan              |



| <b>No</b> | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>   | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>                                   | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|-----------|--|---|--------------|------------------|--|-------------------|------------------------|
| 89        | KELURAHAN BERSINAR (BERSIH NARKOBA)  | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 100               | Penerapan              |
| 90        | "MAMI RAFI"<br>Meningkatkan Akhlak Mulia Melalui Program Tahfiz            | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | pendidikan   | 100               | Penerapan              |
| 91        | LAKON MUDA (LAYANAN KONSULTASI MASALAH UNTUK DAPODIK)                      | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Digital      | OPD              | pendidikan   | 101               | Penerapan              |
| 92        | JUM'AT EMPATI  | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | 95                | Penerapan              |
| 93        | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN E-PLANNING (SIPPD)   | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah   | Digital      | OPD              | Perencanaan  | 97                | Penerapan              |
| 94        | Lajang Sepakat Tiru Papa   | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Non Digital  | OPD              | pendidikan   | 95                | Penerapan              |
| 95        | SIMANIS (SIAP MENIKAHKAN ANDA GRATIS)                                      | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | penanaman modal  | 95                | Penerapan              |
| 96        | Fasilitas Layanan Mandiri (SINANDI)  | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | penanaman modal  | 97                | Penerapan              |
| 97        | "PETAKU PETA TUA"<br>PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS, BANTUAN PAKET/KUOTA | Inovasi pelayanan publik  | Digital      | OPD              | pendidikan   | 94                | Penerapan              |



| <b>No</b>          | <b>Judul Inovasi</b>   | <b>Bentuk Inovasi</b>    | <b>Jenis</b> | <b>Inisiator</b> | <b>Urusan Pemerintah</b>  | <b>Kematangan</b> | <b>Tahapan Inovasi</b> |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|------------------|---|-------------------|------------------------|
| 98                 | SCHOOL OF RANDANG  | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | OPD              | tenaga kerja, perdagangan, perindustrian                                      | 99                | Penerapan              |
| 99                 | "Sarana Layanan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Kota Payakumbuh di DPRD Kota Payakumbuh" (SAYANG AMAKKU) | Inovasi pelayanan publik | Non Digital  | ASN              | Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 94                | Penerapan              |
| <b>JUMLAH</b>      |  |                          |              |                  |   | 9582              |                        |
| <b>INDEKS SKOR</b> |  |                          |              |                  |   | 73,56             |                        |



### 3.14

#### Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Kelitbangan

| NO. | INDIKATOR KINERJA     | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KATEGORI    |
|-----|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------|
| 1   | 3                     | 4      | 5      | 6         |         | 7           |
| 3   | Indeks Inovasi Daerah | INDEKS | 8300   | 9582      | 155,44  | SANGAT BAIK |

**Tabel 3.16**

#### Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran dan Output yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 3

| No | Program                             | Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Output    | Menunjang / Kurang |
|----|-------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1  | Program Pengembangan Inovasi Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)          | 79.749.900         | 74.651.560              | 1 dokumen | Menunjang          |
|    |                                     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan            | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | 92.956.260         | 87.084.640              | 1 dokumen | Menunjang          |
|    |                                     | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                    | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 263.684.600        | 255.759.450             | 31 opd    | Menunjang          |
|    |                                     |   | Diseminasi jenis, prosedur, dan metode yang di seminasikan / disosialisasikan                                      | 28.395.560         | 26.664.800              | 2 inovasi | Menunjang          |



|  |  |  |  |            |            |           |           |
|--|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
|  |  |  | Sosialisasi dan diseminasi hasil - hasil kelitbangan | 27.938.070 | 24.937.800 | 1 dokumen | Menunjang |
|--|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 3 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor pendukung :**

- ✓ Berkembangnya inovasi teknologi tepat guna di masyarakat kota payakumbuh
- ✓ Bertambahnya inovator - inovator inovasi teknologi tepat guna di Kota Payakumbuh

**Faktor Penghambat :**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 3, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel beriku



**Tabel 3.17**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3**

| No   | Sasaran                           | Indikator                                 | Satuan                | Kinerja |           |      | Keuangan |        |                                     |             |             |             |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|---------|-----------|------|----------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                   |   |                       | Target  | Realisasi | (%)  | Program  | Pagu   | Realisasi                           | %           |             |             |
| 3  | Meningkatnya kualitas kelitbangan | 3.1                                       | Indeks inovasi daerah | Nilai   | 8300      | 9582 | 115,44   | 1      | Program Pengembangan inovasi Daerah | 492.724.390 | 469.098.250 | 95,20       |
|  |                                   | <b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b> |                       |         |           |      |          | 115,44 | <b>TOTAL PER SASARAN</b>            |             | 230.335.120 | 222.810.630 |
| <b>TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 18,71%</b>     |                                   |   |                       |         |           |      |          |        |                                     |             |             |             |
| <b>TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 177,59 %</b> |                                   |   |                       |         |           |      |          |        |                                     |             |             |             |

Tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 3.17, dimana tingkat efisiensi berada pada nilai 18,71%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja sebesar 115,44% sedangkan capaian anggaran 95,20% sehingga capaian kinerja Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 3 sebesar 121,26%



## B. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai adalah sebesar Rp. 8.994.689.385,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.463.565.043,- atau dengan capaian sebesar 94,10%. dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 terdapat adalah Silpa Rp. 531.124.342,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

| No. | Misi   | Pagu Anggaran        | Realisasi Anggaran   | %            |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Memantapkan penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif | 8.501.964.995        | 7.414.551.757        | 94,03        |
| 2   | Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat   | 492.724.390          | 469.098.250          | 95,20        |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>8.994.689.385</b> | <b>8.463.565.043</b> | <b>94,10</b> |

Dari tabel 3.25 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2022

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel 3.26 berikut:



**Tabel 3.19**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Perencanaan**  
**Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022**

| No.       | Kategori                  | Jumlah Indikator | Presentase Capaian Kinerja | Anggaran        |       |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|           |                           |                  |                            | Realisasi (Rp.) | %     |
| <b>A.</b> | <b>Misi 1,</b>            | <b>2</b>         |                            |                 |       |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | -                | -                          | 7.994.446.793   | 94,03 |
| 2         | Sesuai Target             | 2                | 100                        |                 |       |
| 3         | Tidak Mencapai Target     |                  |                            |                 |       |
| <b>B.</b> | <b>Misi 2,</b>            | <b>1</b>         |                            |                 |       |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | 1                | 100%                       | 469.098.250     | 95,20 |
| 2         | Sesuai Target             | -                |                            |                 |       |
| 3         | Tidak Mencapai Target     | -                |                            |                 |       |

Pencapaian Misi pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun kelima Renstra 2017-2022, dengan demikian dapat pula diuraikan capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :



**Tabel 3.20**  
**Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2017-2022**

| No | Misi   | Pagu Indikatif Renstra (Rp.) | Realisasi Anggaran tahun ke- |               |               |               |               | Jumlah         | % (dari Pagu Indikatif) |
|----|--|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
|    |  |                              | 1                            | 2             | 3             | 4             | 5             |                |                         |
| A  | Misi 1, Penyelenggaraan sistim perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, implementatif, dan komprehensif | 26.657.017.791               | 4,594,631,616                | 3.145.388.223 | 3.124.764.620 | 5.974.619.984 | 7.414.551.757 | 24.253.956.236 | 90,98                   |
| B. | Misi 2, Menyenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat                               | 3.818.940.853                | 557.336.549                  | 425.748.550   | 388.375.960   | 222.810.630   | 469.098.250   | 2.063.369.939  | 54,02                   |

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi karena ini baru tahun kelima pelaksanaan rancangan Renstra.

### C. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh memperoleh 2 (dua) penghargaan yaitu :

1. Penghargaan sebagai juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.8  
Prestasi Dan Penghargaan Bappeda Tahun 2022

2. Penghargaan peringkat satu kategori kota dengan kemampuan keuangan



rendah untuk Pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)  
Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat (Sumbar) 2022.





## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara semua sasaran telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 8.994.689.385,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.463.565.043,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93.10%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh kondisi anggaran dengan Silpa Rp. 531.124.342,-, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

**Payakumbuh, Januari 2023**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

**YASRIZAL, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680307 199009 1 001